KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI		H.1 NOMOR : 2 0	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 6 9 5			H.4 X Final	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.2 X Pembetulan Ke-	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final	
_							
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 68 807 568 8 722 000							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : ACHMAD SYAHRANI							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAR (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
1	21-402-01	8.270.300	8.270.300	0	5	413.515	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 266							
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 5 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor :							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
	stansi Pemerintah :		0 1 6 2 7 2 2	0 0 0			
C.2 Nama In	stansi Pemerintah :	RUMAH SAKIT JIWA DAE	ERAH ATMA HUSADA MAHAK	AM PROVINSI KA	LIMANTAN	I TIMUR	
C.3 ID Subu	nit Organisasi :						
C.4 Tanggal	:	2 6 dd 0 1 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5 Nama Pe	nandatangan :	HARI JUMADI					
C.6 Pernyata	.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
		Sesuai dengan ketentuan yan elektronik sehingga tidak dipe	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajal rlukan tanda tangan.	ι mengatur bahwa do	kumen ini tel	ah ditandatangani secara	

E397SNLU